



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AWALUDDIN HAFID
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN PRODUK NIAGA
3. NHK : 206050

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 870 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/99 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 18.8 m2/18.8 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.098.088.600**

1. MOTOR, YAMAHA SKUTER MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.855.600
2. MOBIL, MAZDA CX6 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 215.883.000
3. MOBIL, MERCEDES BENZ GLC 250 4MATIC/AWD X253 GLC 250 4MATIC/AWD X253 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 404.600.000
4. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 80.750.000
5. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000



6. MOTOR, HONDA R5F04R24L0 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
43.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	338.510.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	280.321.190
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.816.919.790
III. HUTANG	Rp.	144.818.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.672.101.390

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.